

Efektivitas Penertiban Nota Hasil Intelijen Dalam Rangka Pengawasan Barang Ekspor Di Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Tahun 2024

Citra Novlyani¹, Ahdiat Rizkiansyah², Deni Malik³

Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAM, Jakarta Indonesia

Email: citranovlyani@gmail.com, rizkiansyahdiat@gmail.com, malikdeni12@gmail.com,

Abstract.

Supervision of export activities plays a crucial role in maintaining exporter compliance and preventing potential violations that may lead to state revenue losses. One of the strategic instruments employed by the Directorate General of Customs and Excise is the Nota Hasil Intelijen (NHI), which serves as an early detection tool for potential violations in export activities. This study aims to analyze the effectiveness of export goods supervision based on NHI at the Main Customs Office (KPUBC) Type A Tanjung Priok in 2024, using the effectiveness framework proposed by Martani and Lubis in Hermawan (2017), which includes the resource approach, process approach, and goals approach. This research adopts a qualitative method with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews with six key informants from internal DJBC personnel and business actors, supported by secondary data such as performance reports (LAKIN), standard operating procedures (SOP), and NHI export statistics. The research findings indicate that NHI-based export supervision at KPUBC Tanjung Priok is highly effective, with a 95,83% follow-up rate and various forms of enforcement, including export cancellation, investigation, and seizure of goods by the state. The challenges identified include limitations in human resources, facilities, and technical disruptions in the field. To address these issues, several efforts have been made, such as technical training, inter-unit coordination, and the use of digital documentation tools. In conclusion, the implementation of NHI has significantly improved export compliance and violation prevention, although further strengthening is needed in terms of human resources and operational infrastructure.

Keywords: *Effectiveness, Intelligence Report (NHI), Export Supervision, Customs and Excise, Tanjung Priok*

Cronicle of Article: Received (11,06,2025); Revised (15,06,2025); and Published (28,06,2025)

©2025 Jurnal Administrasi Bisnis & Entrepreneurship, Program Studi Administrasi Bisnis Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAM

Profile and corresponding author : Citra Novlyani adalah Dosen Program Studi Administrasi Bisnis, Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAM. Jl. Pangkalan Asem Raya No. 55 Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat 10530. Corresponding Author: citranovlyani@gmail.com,

How to cite this article : Novlyani C, Rizkiansyah A, Malik D "Efektivitas Penertiban Nota Hasil Intelijen Dalam Rangka Pengawasan Barang Ekspor Di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Tahun 2024", *Adbispreneur*, 5 (3), pp. 216 - 224 Available at: <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUMABI>

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Indonesia sebagai negara kepulauan sangat bergantung pada sektor perdagangan internasional, di mana kegiatan ekspor dan impor memainkan peran strategis dalam pertumbuhan

ekonomi, penyediaan lapangan kerja, serta peningkatan devisa negara. Dalam sistem logistik nasional, pelabuhan menjadi simpul vital distribusi barang, khususnya Pelabuhan Tanjung Priok yang menangani lebih dari 60% arus barang ekspor-impor nasional. Oleh karena itu, pengawasan kepabeanan di pelabuhan ini menjadi fokus utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), guna menjamin kelancaran logistik sekaligus menjaga keamanan ekonomi negara.

Dalam konteks reformasi pengawasan berbasis risiko, DJBC menerapkan Nota Hasil Intelijen (NHI) sebagai instrumen strategis. NHI merupakan hasil analisis intelijen atas potensi pelanggaran ekspor-impor yang bersifat spesifik, akurat, dan mendesak, sebagaimana diatur dalam PER-8/BC/2024. Penyusunan NHI mengikuti siklus intelijen yang mencakup perencanaan, pengumpulan, analisis, hingga distribusi informasi. Dengan pendekatan ini, pengawasan difokuskan pada target berisiko tinggi sehingga efisien tanpa menghambat arus barang.

Sebagai bagian dari Sistem Manajemen Risiko (SMR), NHI mendukung optimalisasi alokasi sumber daya pengawasan. Hal ini penting mengingat ekspor rawan terhadap berbagai pelanggaran seperti undervaluation, misclassifikasi HS Code, hingga ekspor fiktif. Oleh karena itu, pengawasan berbasis NHI menjadi krusial dalam menjaga kepatuhan dan mencegah potensi kerugian negara.

Tahun	Jumlah NHI Ekspor	Perkiraan Nilai Barang
2023	72	Rp 154.802.227.870
2024	96	Rp 81.926.824.490
Total	168	Rp 236.729.052.360

Data dari Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPUBC) Tipe A Tanjung Priok menunjukkan bahwa selama tahun 2023–2024 telah diterbitkan 168 NHI ekspor dengan total nilai barang mencapai Rp236,72 miliar. Terdapat peningkatan jumlah NHI dari 72 pada 2023 menjadi 96 pada 2024. Namun, nilai barang yang diawasi justru menurun dari Rp154,8 miliar menjadi Rp81,9 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh tidak berulangnya pengawasan atas komoditas bernilai tinggi seperti Crude Palm Oil (CPO), yang pada 2023 menyumbang hampir 80% dari nilai NHI.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa peningkatan intensitas pengawasan tidak selalu linier dengan nilai ekonomis komoditas yang diawasi. Selain itu, efektivitas implementasi NHI juga masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan SDM, integrasi data antarunit, serta infrastruktur pendukung seperti pemindai kontainer yang menjadi salah satu dasar penerbitan NHI.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerbitan NHI dalam pengawasan ekspor di KPUBC Tipe A Tanjung Priok, serta mengidentifikasi kendala dan upaya optimalisasi yang dapat dilakukan dalam mendukung pengawasan berbasis intelijen di masa mendatang.

LITERATUR REVIUW

Kajian Pustaka

1. Administrasi Publik

Menurut Sitna Hajar Malawat (2022) Menjelaskan administrasi publik merupakan suatu fenomena sosial, suatu perwujudan tertentu di dalam masyarakat modern. Eksistensi dari pada administrasi ini berkaitan dengan organisasi, artinya administrasi itu terdapat di dalam suatu organisasi. Jadi barang siapa yang hendak mengetahui adanya administrasi dalam masyarakat, maka ia harus mencari terlebih dahulu suatu organisasi yang masih hidup, maka di situ pasti terdapat administrasi. Administrasi publik merupakan disiplin yang mempelajari bagaimana kebijakan pemerintah disusun dan dijalankan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Waldo (1992) menambahkan, menurutnya administrasi publik tidak semata-mata

soal prosedur teknis, melainkan juga tentang penerapan prinsip-prinsip demokrasi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pelayanan publik.

2. Efektivitas

Menurut Ravianto (2014:11) Pengertian efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya, apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif.

3. Pengawasan

Smith (2020) menyatakan bahwa Pengawasan yang efektif adalah fondasi untuk menciptakan tata kelola yang akuntabel dan transparan. Pemanfaatan teknologi digital dalam pengawasan telah membuka peluang baru untuk melakukan monitoring secara *real-time*. Integrasi data dari berbagai sumber memungkinkan identifikasi anomali secara cepat, sehingga langkah korektif dapat segera diambil. Proses pengawasan juga melibatkan evaluasi berkala yang dilakukan oleh lembaga terkait. Evaluasi ini tidak hanya menilai kinerja, tetapi juga memberikan umpan balik untuk perbaikan sistem secara berkesinambungan. Pendekatan kolaboratif antara berbagai instansi menjadi kunci dalam mengoptimalkan proses pengawasan.

4. Barang Ekspor

Barang ekspor adalah produk-produk yang diproduksi secara lokal dan ditujukan untuk pasar internasional, mencerminkan daya saing dan kualitas industri nasional. Waldo (1992) berpendapat bahwa pengembangan barang ekspor harus didukung oleh inovasi, peningkatan mutu, dan pemenuhan standar internasional agar mampu bersaing di pasar global. Hal ini menuntut sinergi antara sektor industri, lembaga riset, dan pemerintah.

5. Nota Hasil Intelijen (NHI)

Nota Hasil Intelijen (NHI) adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh unit intelijen di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), yang berisi hasil analisis informasi dan/atau data intelijen terkait dugaan pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai. Dokumen ini digunakan sebagai dasar dalam menetapkan target pengawasan atas kegiatan kepabeanan, termasuk ekspor, impor, maupun peredaran barang kena cukai. James & Nobes (2009) menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperoleh data yang akurat dan relevan. Hal ini memungkinkan lembaga pengawas untuk merancang strategi pencegahan yang lebih efektif. Studi oleh Smith (2020) mengonfirmasi bahwa penerapan sistem intelijen terintegrasi meningkatkan efektivitas pengawasan dalam mengantisipasi risiko.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam efektivitas pengawasan barang ekspor berbasis Nota Hasil Intelijen (NHI) di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPUBC) Tipe A Tanjung Priok. Pendekatan ini dipilih karena mampu menangkap dinamika sosial, kebijakan operasional, serta praktik kelembagaan yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat mengeksplorasi persepsi, pengalaman, serta interaksi antara petugas Bea Cukai dan eksportir terhadap sistem pengawasan yang berbasis intelijen. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam kepada informan kunci, observasi partisipatif terhadap proses pengawasan ekspor di lapangan, serta analisis dokumentasi yang berkaitan dengan pelaksanaan NHI. Seluruh data primer dan sekunder kemudian divalidasi melalui proses triangulasi untuk memastikan kredibilitas dan keabsahan temuan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara berlapis. Studi kepustakaan dilakukan untuk memahami kerangka normatif dan teoritis yang melandasi pengawasan ekspor berbasis NHI. Observasi langsung di lapangan dilakukan untuk memperoleh gambaran faktual atas pelaksanaan prosedur pengawasan. Sementara itu, wawancara mendalam

dilakukan terhadap enam informan yang dipilih secara purposive, meliputi pejabat Bea dan Cukai, petugas pengawasan, eksportir, dan akademisi. Dokumentasi juga menjadi sumber penting yang mencakup dokumen internal DJBC, SOP pengawasan, laporan NHI, serta data statistik ekspor. Validasi data dilakukan melalui triangulasi metode dan sumber guna memastikan keandalan dan kekayaan data penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan interaktif sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Mulyadi (2020), yang terdiri atas tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Proses ini dilakukan secara simultan dengan pengumpulan data untuk memungkinkan identifikasi tema, pola perilaku, serta simpulan substantif yang sesuai dengan fokus penelitian. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya mendeskripsikan efektivitas pelaksanaan NHI, tetapi juga memberikan rekomendasi berbasis bukti untuk penguatan pengawasan ekspor yang adaptif terhadap risiko dan tantangan operasional di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Selain menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, penelitian ini juga didukung oleh data sekunder untuk memperkuat validitas dan memperluas konteks analisis. Data sekunder yang digunakan meliputi dokumen resmi, laporan kinerja instansi, statistik kepabeanan, serta dokumen internal yang relevan dengan kegiatan pengawasan ekspor berbasis Nota Hasil Intelijen (NHI) di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPUBC) Tipe A Tanjung Priok. Tujuan utama pemanfaatan data sekunder ini adalah untuk memberikan landasan analisis yang lebih kuat, menguji konsistensi temuan lapangan, serta menampilkan gambaran kuantitatif atas efektivitas implementasi NHI sebagai bagian dari sistem manajemen risiko kepabeanan.

Tahun	Jumlah NHI Ekspor	Perkiraan Nilai Barang
2023	72	Rp 154.802.227.870
2024	96	Rp 81.926.824.490
Total	168	Rp 236.729.052.360

Data pertama yang dianalisis adalah jumlah dan nilai barang ekspor yang masuk dalam kategori NHI pada periode tahun 2023 hingga 2024. Berdasarkan data yang diperoleh dari DJBC, sepanjang dua tahun tersebut, KPUBC Tanjung Priok menerbitkan total 168 NHI ekspor, dengan rincian 72 NHI pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 96 pada tahun 2024. Namun demikian, meskipun jumlah NHI meningkat, nilai barang ekspor yang diawasi justru mengalami penurunan signifikan, dari Rp154,8 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp81,9 miliar pada tahun 2024. Penurunan ini dapat dijelaskan oleh dominasi komoditas bernilai tinggi seperti Crude Palm Oil (CPO) dalam NHI tahun 2023 yang mencapai sekitar Rp124 miliar. Tidak adanya temuan CPO pada tahun berikutnya menyebabkan penurunan total nilai barang, meskipun intensitas pengawasan mengalami peningkatan. Temuan ini mencerminkan bahwa kuantitas pengawasan tidak selalu berbanding lurus dengan nilai ekonomis komoditas yang diawasi, serta menunjukkan dinamika pergeseran fokus dan karakteristik risiko yang berubah seiring waktu.

Tahun	NHI Ekspor	Ditindaklanjuti	Persentase Efektivitas	Kriteria Efektivitas
2023	72	68	94,44%	Sangat Efektif
2024	96	93	96,88%	Sangat Efektif
Total	168	161	95,83%	Sangat Efektif

Selanjutnya, penelitian juga menganalisis data mengenai tindak lanjut terhadap NHI ekspor yang diterbitkan. Berdasarkan data DJBC, dari 72 NHI pada tahun 2023, sebanyak 68 berhasil ditindaklanjuti, menghasilkan efektivitas sebesar 94,44%. Sementara itu, pada tahun 2024, dari 96 NHI, sebanyak 93 ditindaklanjuti dengan tingkat efektivitas 96,88%. Secara kumulatif, tingkat efektivitas penindakan terhadap NHI ekspor selama dua tahun tersebut mencapai 95,83%, yang dikategorikan sebagai “sangat efektif”. Tingginya angka efektivitas ini menunjukkan bahwa kebijakan pengawasan berbasis NHI telah mampu diterapkan secara operasional dan direspons dengan cepat oleh unit pelaksana. Hasil ini juga menunjukkan bahwa produk intelijen yang dikembangkan memiliki akurasi tinggi, serta terdapat koordinasi yang baik antara unit intelijen dan pelaksana pengawasan di lapangan. Namun demikian, efektivitas administratif ini perlu dilihat lebih dalam dari sisi dampak jangka panjang terhadap perilaku eksportir serta kontribusinya terhadap perbaikan kepatuhan dan penurunan risiko pelanggaran.

Penelitian ini juga mengidentifikasi keragaman jenis komoditas ekspor yang masuk dalam pengawasan berbasis NHI. Berdasarkan data yang dihimpun dari dokumen DJBC, setidaknya terdapat 23 jenis komoditas yang tercatat dalam kategori NHI, meliputi sektor-sektor strategis seperti pertanian, perikanan, kehutanan, pertambangan, serta industri manufaktur. Komoditas seperti minyak sawit dan turunannya, produk kayu dan rotan, logam mulia, bahan kimia, tekstil dan produk tekstil, serta kendaraan bermotor merupakan sebagian dari objek utama pengawasan. Diversifikasi komoditas ini menunjukkan bahwa pengawasan berbasis NHI telah mencakup spektrum sektor yang luas dan berisiko tinggi terhadap praktik manipulasi klasifikasi, nilai transaksi, ataupun penyalahgunaan dokumen. Fakta ini juga menegaskan bahwa NHI tidak hanya relevan dalam konteks pengawasan impor, tetapi telah menjadi instrumen penting dalam menjamin integritas kegiatan ekspor nasional.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan NHI dalam pengawasan ekspor di KPUBC Tanjung Priok telah berlangsung secara intensif dan efektif. Tingginya tingkat penindakan, perluasan cakupan komoditas, dan kemampuan mendeteksi potensi pelanggaran sejak dini melalui intelijen merupakan indikator keberhasilan implementasi sistem pengawasan berbasis risiko. Namun demikian, efektivitas tersebut juga menghadapi tantangan yang tidak dapat diabaikan, seperti perlunya penguatan infrastruktur pendukung, pengembangan sistem informasi terintegrasi, dan peningkatan kapasitas SDM dalam menganalisis serta menindaklanjuti produk intelijen secara adaptif terhadap dinamika perdagangan global.

Pembahasan

1. Efektivitas Penerbitan Nota Hasil Intelijen dalam Rangka Pengawasan Barang Ekspor di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Tahun 2024.

Pengawasan ekspor berbasis Nota Hasil Intelijen (NHI) merupakan instrumen strategis DJBC dalam menerapkan sistem manajemen risiko, dengan tujuan mendorong kepatuhan dan mencegah pelanggaran ekspor yang berpotensi merugikan negara. Efektivitas implementasi kebijakan ini dianalisis menggunakan teori Martani dan Lubis dalam Hermawan (2017), melalui tiga pendekatan utama: sumber (resource), proses (process), dan sasaran (goals).

Pada pendekatan sumber, efektivitas pengawasan sangat bergantung pada kualitas data intelijen, kecukupan SDM, serta dukungan infrastruktur dan anggaran operasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data dari sistem CEISA, profiling risiko, serta observasi lapangan telah menjadi fondasi dalam menyusun NHI. Namun, beberapa kendala masih mengemuka, seperti belum meratanya kompetensi SDM dalam menganalisis pola pelanggaran ekspor, terbatasnya alat dokumentasi lapangan, serta keterlambatan input data akibat gangguan sinyal di

pelabuhan. Selain itu, keterbatasan fleksibilitas anggaran menjadi hambatan saat respons cepat sangat diperlukan di lapangan. Oleh karena itu, efektivitas dalam pendekatan sumber dapat dikatakan cukup baik, namun menuntut penguatan signifikan di aspek teknologi dan manajerial.

Pendekatan sasaran menilai sejauh mana tujuan pengawasan melalui NHI tercapai. Data tahun 2023–2024 menunjukkan bahwa jumlah NHI meningkat dari 72 menjadi 96 kasus, meskipun nilai barang yang diawasi menurun dari Rp154,8 miliar menjadi Rp81,9 miliar. Penurunan nilai disebabkan oleh tidak berulangnya kasus ekspor CPO bernilai besar seperti pada 2023. Namun, peningkatan jumlah kasus menunjukkan perluasan cakupan pengawasan terhadap komoditas bernilai sedang dan rendah, yang selama ini cenderung terlewat. Berdasarkan Tabel IV.6, tindak lanjut hasil pemeriksaan menunjukkan dominasi pembatalan ekspor (54 kasus di 2023 dan 63 kasus di 2024), serta peningkatan kasus yang diteruskan ke penyidikan (dari 4 menjadi 15 kasus). Hal ini menunjukkan bahwa sistem NHI mampu mendeteksi indikasi pelanggaran serius. Efektivitas secara keseluruhan diperkuat oleh fakta bahwa 161 dari 168 NHI dalam dua tahun ditindaklanjuti (95,83%), menjadikannya sebagai sistem pengawasan yang tidak hanya reaktif, tetapi juga preventif dan edukatif.

2. Kendala dalam Penerbitan Nota Hasil Intelijen dalam Rangka Pengawasan Barang Ekspor di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Tahun 2024

Pelaksanaan NHI di lapangan masih menghadapi tantangan yang kompleks, baik dari sisi infrastruktur, sumber daya manusia, koordinasi, maupun pendanaan. Kendala pertama adalah terbatasnya infrastruktur digital, seperti gangguan jaringan internet di area pelabuhan yang menghambat input data real-time ke CEISA, serta minimnya perangkat dokumentasi berbasis digital seperti kamera dan pemindai lapangan. Padahal dokumentasi menjadi komponen penting dalam pembuktian dan pelaporan hasil pengawasan berbasis NHI.

Kedua, dari aspek SDM, kebutuhan pelatihan yang lebih spesifik dalam menganalisis risiko ekspor dan memahami karakteristik komoditas sangat mendesak. Pengawasan NHI mencakup lebih dari 20 jenis komoditas, masing-masing dengan risiko dan metode verifikasi berbeda. Ketidaksiapan personel dalam membaca dokumen, mengenali HS Code, atau mendeteksi modus undervaluation dapat menimbulkan kesalahan administratif yang berpengaruh pada hasil pengawasan.

Ketiga, koordinasi antarunit internal sering kali mengalami delay, terutama pada saat verifikasi silang atau ketika pengawasan memerlukan pelibatan instansi eksternal seperti Kementerian Perdagangan atau KLHK. Meskipun struktur koordinasi telah terbentuk, kecepatan dalam alur validasi data belum sepenuhnya optimal. Terakhir, proses administratif dalam pengajuan anggaran operasional belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan taktis di lapangan. Prosedur yang rigid sering kali tidak sejalan dengan urgensi pengawasan intelijen yang membutuhkan kecepatan dan fleksibilitas tinggi.

3. Upaya untuk Menghadapi Kendala dalam Penerbitan Nota Hasil Intelijen dalam Rangka Pengawasan Barang Ekspor di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok 2024.

Sebagai respons terhadap berbagai hambatan tersebut, KPUBC Tipe A Tanjung Priok telah menerapkan sejumlah strategi adaptif. Pertama, dilakukan pelatihan teknis lanjutan bagi petugas, khususnya terkait analisis risiko dan metode deteksi pelanggaran dokumen ekspor. Selain itu, personel non-teknis mulai dilibatkan sebagai cadangan operasional dalam kondisi tertentu, menunjukkan pergeseran menuju pendekatan organisasi yang lebih fleksibel dan resilien.

Kedua, pengadaan alat dokumentasi portable dan pengembangan sistem pencatatan berbasis aplikasi offline telah dilaksanakan untuk mengatasi kendala sinyal dan pelaporan lapangan. Langkah ini memperkuat akuntabilitas proses serta validitas data hasil pemeriksaan. Ketiga, pembentukan tim koordinasi lintas unit dengan otoritas eksekusi langsung menjadi

solusi manajerial untuk mempercepat proses pengambilan keputusan tanpa mengorbankan akurasi.

Ketiga, KPUBC aktif menyampaikan laporan evaluatif ke Kantor Pusat DJBC terkait kelemahan sistem dashboard NHI dan kebutuhan pembaruan parameter risiko ekspor, sehingga pelaksanaan kebijakan tetap terhubung dengan dinamika lapangan. Selain itu, KPUBC juga mengembangkan pendekatan edukatif dengan eksportir melalui komunikasi intensif dan fasilitasi penyusunan SOP internal oleh pelaku usaha, untuk membentuk budaya kepatuhan yang tidak hanya berdasarkan kewajiban hukum, tetapi juga kesadaran kolektif.

Secara keseluruhan, upaya yang dilakukan oleh KPUBC Tanjung Priok mencerminkan bahwa keberhasilan pengawasan ekspor tidak hanya tergantung pada kekuatan regulasi dan sistem informasi, tetapi juga ditentukan oleh kualitas respons organisasi, efektivitas koordinasi, serta kemitraan konstruktif dengan pelaku usaha. Strategi ini tidak hanya memperkuat pelaksanaan NHI sebagai alat pengawasan, tetapi juga meletakkan fondasi pengawasan ekspor yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap tantangan global.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis terhadap tiga pendekatan efektivitas menurut Martani dan Lubis, pelaksanaan pengawasan ekspor berbasis NHI di KPUBC Tanjung Priok tahun 2024 dapat dikategorikan sangat efektif. Dari pendekatan sumber, sistem pendukung regulatif dan data sudah tersedia namun membutuhkan penguatan sarana dan pelatihan lanjutan. Dari pendekatan proses, mekanisme kerja dan koordinasi telah berjalan sesuai SOP dengan adaptasi yang baik terhadap dinamika di lapangan. Dari pendekatan sasaran, tujuan kebijakan tercapai secara nyata dalam bentuk peningkatan kepatuhan, cakupan pengawasan, dan tindak lanjut dari pemeriksaan fisik berdasarkan NHI.
2. Kendala dalam pelaksanaan NHI ekspor meliputi keterbatasan jumlah SDM dan kompetensi teknis petugas, hambatan komunikasi antarunit, serta tantangan teknis seperti gangguan sinyal dan keterbatasan sarana dokumentasi di lapangan. Selain itu, masih terdapat gap pemahaman antara pelaku usaha dan petugas bea cukai terkait pelaksanaan NHI, serta belum optimalnya pemanfaatan data intelijen dalam pengambilan keputusan strategis. Kendala-kendala ini menghambat efektivitas pengawasan secara menyeluruh dan menimbulkan potensi keterlambatan atau inkonsistensi dalam proses tindak lanjut terhadap barang ekspor berisiko tinggi.
3. Berbagai upaya telah dilakukan KPUBC Tanjung Priok untuk menghadapi kendala tersebut, di antaranya pelatihan teknis mandiri dan terstruktur bagi petugas, pembentukan tim koordinasi cepat antarunit, penggunaan perangkat digital untuk dokumentasi, serta penyederhanaan alur internal pengajuan. Selain itu, pelaku usaha juga terlibat aktif melalui edukasi internal dan partisipasi dalam sosialisasi kebijakan. Secara umum, langkah-langkah ini menunjukkan adanya sinergi antara peningkatan kapasitas internal, perbaikan sistem operasional, dan kolaborasi eksternal sebagai kunci keberhasilan dalam memperkuat efektivitas pengawasan berbasis NHI secara berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas, kendala, dan upaya dalam penerbitan Nota Hasil Intelijen (NHI) dalam rangka pengawasan barang ekspor di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Tahun 2024, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Tingkatkan kompetensi teknis petugas melalui pelatihan berkelanjutan agar mampu mengidentifikasi risiko dan pola pelanggaran ekspor secara tepat.
2. Perkuat sistem informasi dan infrastruktur *digital*, termasuk pengadaan perangkat dokumentasi serta perbaikan jaringan di lapangan guna mendukung tindak lanjut NHI yang lebih efisien.

3. Sederhanakan prosedur operasional dan pendanaan, dengan mempercepat koordinasi lintas unit dan mempermudah akses kebutuhan pengawasan mendesak.
4. Perkuat komunikasi antarunit dan dengan eksportir, agar proses pengawasan berjalan lebih terkoordinasi dan pemahaman terhadap NHI meningkat.
5. Perluas edukasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha melalui bimbingan teknis dan panduan kepatuhan untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan terhadap ketentuan ekspor.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arianto, B. (2024). Triangulasi Metoda Penelitian Kualitatif.
- Bird, R. M., & Zolt, E. M. (2005). *Tax Policy in Emerging Markets: Developing Countries*. Cambridge University Press.
- Hardi Fardiansyah, S. E., SH, M., Christina Bagenda, S. H., MH, C., Citra Lutfia, S. E., Gita Arasy Harwida, S. E., ... & Roza Fitriawati, S. E. (2023). *Kepabeanan Dan Beacukai*. Penerbit Widina.
- James, S., & Nobes, C. (2009). *The Economics of Taxation*. Prentice Hall.
- Malawat, S. H. (2022). *Buku Ajar Pengantar Administrasi Publik*.
- Mintaredja, H. (2020). *Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Implementasi*. Jakarta: Prenada Media.
- Mulyono. (2021). *Manajemen dan Administrasi Modern*. Bandung: Alfabeta.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*. Addison-Wesley.
- Rangkuty, D. M. (2023). *Ekspor Impor*. Penerbit Tahta Media.
- Sendouw, R. H., Mantiri, J., & Supit, B. F. (2023). *Administrasi Perpajakan Indonesia*.
- Waldo, D. (1992). *The Administrative State: A Study of the Political Theory of American Public Administration*. Holmes & Meier.
- Winarno, D. (2022). *Administrasi Digital: Inovasi dan Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Deepublish.

Jurnal

- Aulia, M. F., & Nasution, J. (2022). Analisis Implementasi Pengawasan Ekspor Impor Barang Pada KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan. *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (EBMA)*, 3(1), 298-304.
- Haryatmaja, B. D. (2016). Penanganan Impor Gandum Pakan Ternak Yang Terkena Nota Hasil Intelijen (NHI) Oleh PT Mitra Kargo Indonesia (Studi Kasus di PT Mitra Kargo Indonesia).
- Hermawan, H. (2017). Efektivitas Penarikan Pajak Bumi Dan Bangunan Oleh Perangkat Desa Di Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 150-167.
- Kristyaningrum, N. S. D. (2016). Penanganan barang ekspor yang terkena nota hasil intelejen (nhi)(studi kasus ekspor furniture pt andalan pacific samudra Semarang).

- Khadafi, MF, & Wiriani, E. (2022). Prosedur Pengawasan Lalu Lintas Barang Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Langsa.
- Pae, N. T., Hasbullah, H., Kurnia, I., & Nuraisyah, N. (2024). Efektivitas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dalam Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkup Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 5(3), 439-448.
- Pahlevi, R. (2024). Customs Intelligence Strategy Encountering Smuggling Threats in a Changing World. *Pakistan Journal of Criminology*, 16(431).
- Sani, I., & nanda Lubis, S. (2022). PROSES PENGURUSAN DOKUMEN BARANG EKSPOR PADA PT. BAHARI EKA NUSANTARA CABANG MEDAN. *Journal Of Maritime And Education (Jme)*, 4(1), 358-363.
- Simare-mare, S., & Pandia, H. (2023). Rekomendasi komoditas ekspor menggunakan K-Nearest Neighbor. *Jurnal Sistem Informasi*, 10(2), 150-156.
- Smith, A. (2020). "Public Administration and Digital Governance: Trends and Challenges." *Journal of Public Policy*, 35(1), 45–67.
- Steers, R. M. (1977). "Antecedents and Outcomes of Organizational Effectiveness: A Theoretical Framework and Empirical Review." *Academy of Management Review*, 2(3), 546–560.
- Susanto, E., Lina, D. R. L. S., SH, M., Khalimi, D. K., & SH, M. (2022). Analisis Efektivitas Hukum Dalam Kebijakan Pengawasan Di Bidang Kepabeanan Dan Cukai Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jayapura. *Jurnal Reformasi Administrasi*, 9(1), 82-92.

Peraturan Undang – undang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman.

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-8/BC/2024 Tentang Tata Laksana Pengawasan Di Bidang Kepabeanan dan Cukai